



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023



TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Ketua

Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
BPS Kabupaten Badung

Penyunting/Editor

Perencana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Pengolah Data

Tim SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Penata Letak

Perencana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugrahanya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penyusunan LkjIP Tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pertanggungjawaban Kinerja Pembangunan di Bidang Pertanian dan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023, yang diukur dengan 4 indikator kinerja utama untuk pencapaian 4 sasaran strategis dengan di dukung 9 Program, 27 Kegiatan serta 49 Sub Kegiatan.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu usul, saran dan masukan dari semua pihak untuk upaya perbaikan sangat kami hargai, namun secara umum masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung selama Tahun 2023 sebagai implementasi dari RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026.

Mangupura, 26 Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,



Dr. I Wayan Wijana S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198812 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	2
1.3 Ruang Lingkup	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Indikator Kinerja Utama	12
2.3 Rencana Kerja	13
2.4 Perjanjian Kinerja	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Pengukuran Kinerja	23
3.2 Analisis Capaian Kinerja	24
3.3 Aspek Keuangan	44
3.4 Prestasi yang diraih	52
BAB IV. PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Rekomendasi	55
4.3 Program Inovasi.....	56

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023	13
Tabel 2.3	Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023.....	21
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023	24
Tabel 3.2.1	Capaian Peningkatan Produksi Strategis dalam negeri Tahun 2021, Tahun 2022	25
Tabel 3.3.1	Analisa Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2023	39

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	VI
Grafik 2. Produksi Kumulatif Pangan Strategis.....	27
Grafik 3. Produksi Kumulatif Pangan Strategis.....	27
Grafik 4. Indeks Pertanaman.....	35

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah selama kurun waktu satu tahun anggaran. LkjIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, dijelaskan pula pertanggungjawaban pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung tahun 2021-2026 sebagai implementasi dari pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana tahun 2021 – 2026.

RINGKASAN EKSEKUTIF

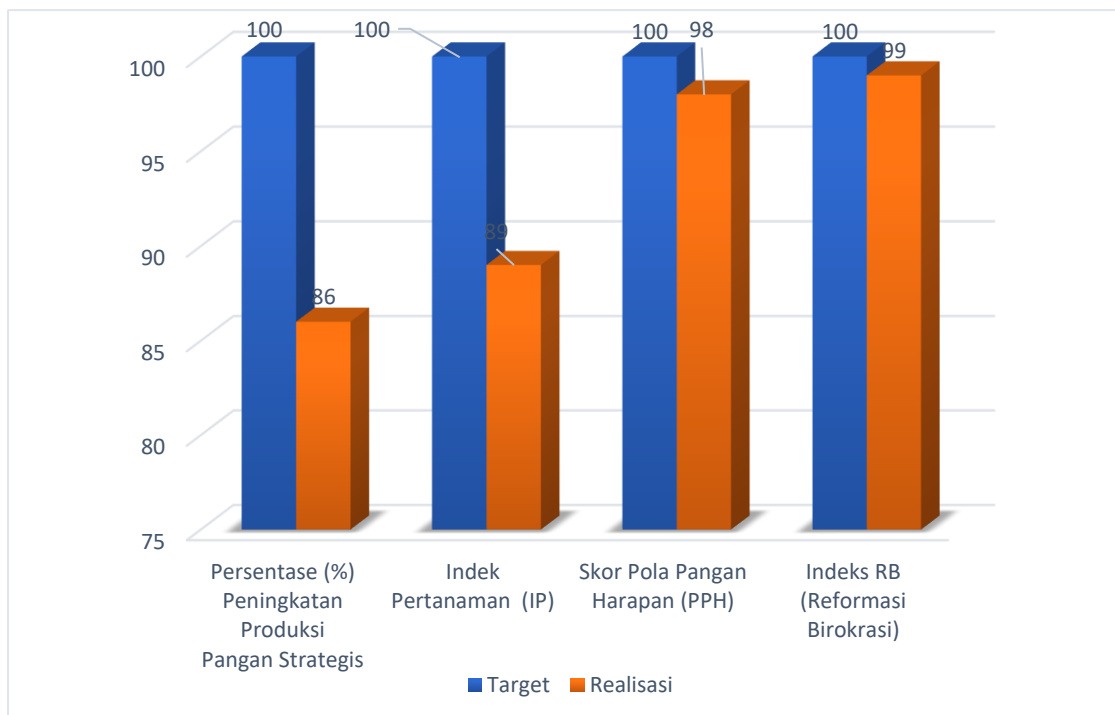


Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam kapasitasnya sebagai pelaksana teknis membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertanian dan pangan dituntut mampu memberikan kontribusi atas pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Target Kinerja dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026, serta ikut bertanggungjawab mewujudkan Misi 8 yaitu Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

Secara umum capaian kinerja kinerja RJMD sudah tercapai sesuai terget sehingga sudah dilakukan revisi target. Begitu pula capaian kinerja atas sasaran dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan menunjukkan kinerja yang baik. Dari 4 (Empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator dengan capaian kinerja tahun 2023 rata-rata 93% , dan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapai 100% yakni karena perubahan cuaca yang ekstrem serta perbaikan saluran irigasi sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja yang ditetapkan, alih fungsi lahan, ketersediaan air dan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.

Secara ringkas capaian kinerja tahun 2023 masing-masing indikator seperti diagram berikut :

CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN 2023



Berdasarkan kategori capaian kinerja tersebut diatas, 4 (empat) indikator dalam kategori tinggi .Adapun alokasi anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 88.073.810.157,-.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dan efektivitas program/kegiatan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga bisa dilakukan antisipasi apabila terjadi perubahan cuaca yang ekstrem maupun perbaikan saluran irigasi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
2. Melakukan penyempurnaan terhadap pohon kinerja sehingga dapat dirumuskan sasaran kinerja yang seharusnya dicapai dan didukung dengan program/kegiatan yang benar-benar dapat mencapai output dan outcome yang mendukung pencapaian target kinerja.
3. Menjalni kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan luas tanam, produksi dan memperluas akses pemasaran.

Melaksanakan program inovasi untuk meningkatkan pelayanan melalui program Badung Go Tani, Matanabe, Mangupura Vet Care, pembangunan Display Kopi dan melaksanakan pasar Mini Tani.

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan hal ini diperlukan karena aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.

BAB I PENDAHULUAN

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, maka pengukuran terhadap kinerja sangat penting untuk dilakukan. Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan adanya indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek inputs, outputs, tapi juga sampai pada out comes, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian dan pangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian dan pangan;

4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pertanian dan pangan.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum Dan Keuangan
- b. Analis Kepegawaian Ahli Muda
- c. Perencana Ahli Muda

3. Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian

- a. Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda
- b. Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Muda
- c. Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda

4. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura

- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

5. Bidang Perkebunan

- a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
- b. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda

6. Bidang Peternakan

- a. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
- b. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

7. Bidang Kesehatan Hewan

- a. Medik Veteriner Ahli Muda
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian

8. Bidang Pangan Dan Penyuluhan

- a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- c. Analis Kebijakan

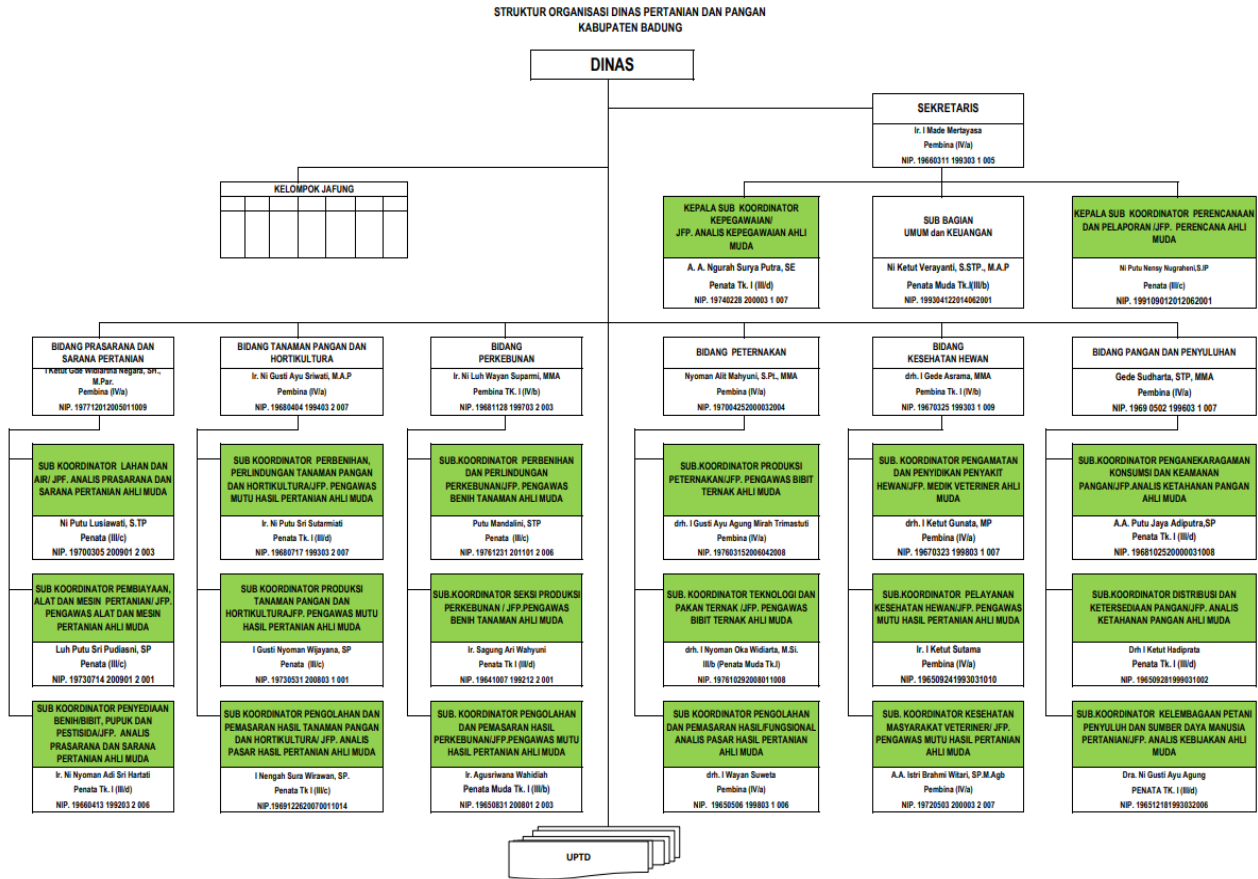
9. Unit Pelaksana Teknis Di 6 Kecamatan

- a. Kepala Uptd Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
- b. Kepala Uptd Balai Benih Utama Padi, Palawija Dan Hortikultura
- c. Kepala Uptd Pusat Kesehatan Hewan Mengwi
- d. Kepala Uptd Pusat Kesehatan Hewan Petang
- e. Kepala Uptd Rumah Potong Hewan
- f. Kepala Uptd Pembibitan Tanaman Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Arboretum

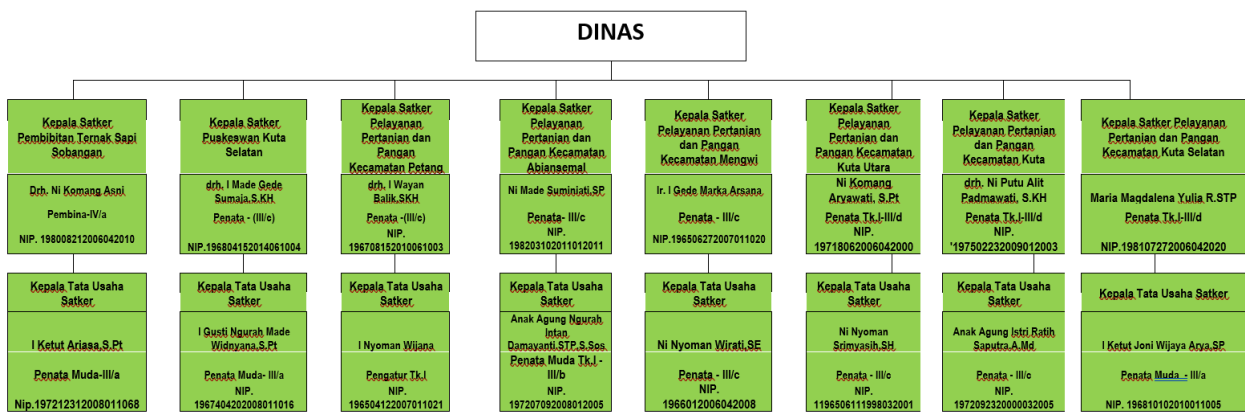
10. Satuan Kerja (SATKER)

- a. Satker Pembibitan Ternak Sapi Sobangan
- b. Satker Puskesmas Kuta Selatan
- c. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Petang
- d. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Abiansemal
- e. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Mengwi
- f. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta Utara
- g. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta
- h. Satker Pelayanan Pertanian dan Pangan Kecamatan Kuta Selatan

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan KabupatenBadung dapat dilihat dalam gambar berikut :



SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja ini, pada dasarnya berupaya untuk menjawab sasaran RPJMD kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Petanian dan Pangan Kabupaten Badung. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka setiap perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sesuai instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu, perlu pula memperhatikan:

- Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing SKPD serta memuat baik keberhasilan maupun kegagalan.
- Prinsip Prioritas, yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban SKPD yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
- Prinsip Manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biayapenyusunannya dan bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

LKjIP mencerminkan kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran yang berbasis kinerja artinya pelaksanaan kegiatannya terukur, teruji dengan sasaran yang jelas.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sesuai Visi dan Misi Bupati Badung dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, maka pada Tahun Anggaran 2023 terdapat 4 Sasaran 4 indikator Kinerja yang ingin dicapai, dengan dukungan 9 Program, 27 Kegiatan serta 49 Sub Kegiatan dan telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) 2023.

2.1.RENCANA STRATEGIS

Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali Program pembangunan bidang pertanian dan pangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sudah semestinya seiring, sejalan dan bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala daerah maupun dalam skala nasional, dimana dalam implementasi/ pelaksanaannya harus bersinergi dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Keberhasilan program pemerintah daerah adalah cerminan dari keberhasilan program pemerintah pusat.

Seirama dengan rencana strategis kementerian terkait, rencana strategis perangkat daerah 5 tahun ke depan bila ditarik benang merahnya, dapat dilihat dari visi dan misi renstra yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap kementerian dan provinsi sebagai berikut telaahan Renstra Kementerian Pertanian:

Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 :

”Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020– 2024, Misi yang ditetapkan ada 3 yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.



Sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi tersebut adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Selain mendukung program strategis nasional, Dinas Pertanian dan Pangan juga mendukung program strategis sektoral yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali. Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 adalah

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam mewujudkan Bali era baru”

Adapun Misi yang diemban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali adalah :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas memadai bagi kehidupan krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.



Strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah: Mempercepat peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani. Arah Kebijakan yang dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan produksi pangan pokok
2. Meningkatkan produksi dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Meningkatkan kapasitas SDM Pertanian Krama Bali
4. Meningkatkan Produktivitas Ternak
5. Meningkatkan kesehatan hewan secara berkelanjutan
6. Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung berusaha menyelaraskan Misi dan Sasaran yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali meskipun dengan nomenklatur bahasa yang berbeda tetapi arti yang sama disesuaikan dengan target pencapaian Visi dan Misi Bapak Bupati – Wakil Bupati Badung terpilih Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan melalui perbaikan sistematis dan kebijakan di bidang pertanian dan pangan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Pertanian dan Pangan di Kabupaten Badung yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maupun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2021-2026 digunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dalam pencapaian visi dan misi Bupati Badung serta tujuan organisasi. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selalu memperhatikan keseimbangan pembangunan yang ada di Badung Selatan, Badung Tengah dan Badung Utara, sebagai satu kesatuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan sehingga terwujud pembangunan yang terencana dan berkelanjutan dengan dilandasi falsafah *”Tri Hita Karana”*, khususnya dalam sub sektor Pertanian dan Pangan.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 ,ditetapkan Visi Kabupaten Badung yaitu:

“MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA ”



Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas serta memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan 9 Misi (Misi 2021-2026) Kabupaten Badung. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam mewujudkan visi Kabupaten Badung mengacu dan mendukung **misi 8, yaitu :**

“Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam”

Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang telah ditetapkan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan Tujuan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Tujuan.

Adapun Tujuan dari Dinas Pertanian dan Pangan, yaitu :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat”

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. Sasaran juga memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji, dapat diukur dan dapat dicapai serta saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Pangan periode tahun 2016 – 2023 adalah sebanyak 4 (empat) Sasaran, yaitu :

- 1 Meningkatkan Produksi Pangan Strategis
- 2 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
- 3 Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan
- 4 Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian

Adapun korelasi antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan:	Sasaran :
Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	<p>Meningkatnya Produksi Pangan Strategis</p> <p>Optimalisasi Pemanfaatan Lahan</p> <p>Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan</p> <p>Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian</p>

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,15%
2.	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	a. Indek Pertanaman (IP)	2,082
3.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,98
4.	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	a. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,96

2.3. RENCANA KINERJA

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2023 melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu : Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Besaran anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.88.073.810.157 yang terdiri dari :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan : Rp. 7.668.608.513
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian : Rp. 80.405.201.644

Adapun rinciannya Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sebagai berikut :

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR	TARGET	PAGU
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			7.668.608.513
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	7.633.473.054
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50627.16 Ton	4.604.412.344
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	1.207.227.650
2	09	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	3.397.184.694
2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik	100 %	1.708.000.000
2	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Ton	1.708.000.000
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	7 Kelompok	1.321.060.710

2	09	03	2,04	02	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	93 %	11.371.075
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	15 Dokumen	5.815.590
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	5.815.590
2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	1 Laporan	5.555.485
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.555.485
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	23.764.384
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	3 Kelompok	23.764.384
2	09	05	2,01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	15.606.720
2	09	05	2,01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.253.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKjIP	84,55 0	46.612.089.262
3	27	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu	7 Dokumen	13.544.200
3	27	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.292.383

3	27	01	2,01	07			4 Laporan	7.251.817
3	27	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu</i>	2240 O/B	39.126.078.857
3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2240 O/B	39.126.078.857
3	27	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu</i>	100%	8.074.254
3	27	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.856.918
3	27	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	2.217.336
3	27	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu</i>	41 Paket	966.835.101
3	27	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	24.500.000
3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.435.794
3	27	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	34.171.273
3	27	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	724.265.947
3	27	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.442.087

3	27	01	2,06	06	Peralatan Perundang-undangan	Dokumen dan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	67.020.000
3	27	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.589.636.386
3	27	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	291.930.000
3	27	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	2.510.753.379
3	27	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	786.953.007
3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	36 Laporan	1.489.189.791
3	27	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	604.913.679
3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	872.276.112
3	27	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	586 Unit	1.418.730.673
3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161 Unit	1.175.353.941
3	27	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	411 Unit	118.996.732

3	27	01	2,09	09		Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	124.380.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	133648.2 Ton	18.309.211.929
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 Kelomp	13.369.337.493
3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	9.421.019.605
3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8 Laporan	3.948.317.888
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	0,4 %	460.359.942
3	27	02	2,02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	407.007.189
3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	53.352.753
3	27	02	2,03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	25 Sampel	32.158.591
3	27	02	2,03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	32.158.591
3	27	02	2,04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	7 Pengecer obat Hewan	1.355.529
3	27	02	2,04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	1.355.529

3	27	02	2,05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	9 Kelompok	15.809.337
3	27	02	2,05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	15.809.337
3	27	02	2,06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	400 Ekor	4.430.191.037
3	27	02	2,06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	162 Ekor	4.430.191.037
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	20739.85 Ha	6.919.240.210
3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Dokumen	86.581.446
3	27	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	86.581.446
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.482.144.699
3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	3.482.144.699
3	27	03	2,03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik	1 Wilayah	3.350.514.065
3	27	03	2,03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	3.350.514.065
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	100 %	4.691.787.269

3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	13 Laporan	4.113.895.962
3	27	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	13 Laporan	4.113.895.962
3	27	04	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa	1 Laporan	346.506.554
3	27	04	2,03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	346.506.554
3	27	04	2,04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi	62 Lokasi	231.384.753
3	27	04	2,04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	44.070.588
3	27	04	2,04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	1 Laporan	122.615.833
3	27	04	2,04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	64.698.332
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	1.326.633.037
3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	430 Ha	1.326.633.037
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Ha	141.966.653
3	27	05	2,01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25 Ha	1.184.666.384

3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	2.546.239.937
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompk Tani	8496 Kali	2.546.239.937
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	1.271.805.017
3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	82 Unit	249.166.684
3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	59 Unit	1.025.268.236

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja direalisasikan dengan Penetapan kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang akan menerima tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggungjawab/kinerja.

Dikarenakan adanya refofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan situasi APBD Badung yang terpengaruh oleh situasi Covid-19, maka Perjanjian kinerja tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mengalami perubahan seperti pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4.
Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,15 %	0,15 %
2.	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	a. Indek Pertanaman (IP)	2,082	2,082
3.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,98	95,98
4.	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	a. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,96	24,96

Program kerja oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung padatahun 2023 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	
		Induk	Perubahan
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 2.891.455.059	Rp. 7,633,473,054
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.10.621.075	Rp. 11,371,075
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.29.417.224	Rp. 23,764,384

4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.126.078.857	Rp. 46,612,089,262
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 14.739.888.405	Rp. 18,309,211,929
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 11.639.110.561	Rp. 6,919,240,210
7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 3.232.818.965	Rp. 4,691,787,269
8.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 439.958.400	Rp. 1,326,633,037
9.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.101.727.667	Rp. 2,546,239,937
	Total	Rp. 43.224.737.269	Rp. 88.073.810.157

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data - data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) Data internal, berasal dari sistem informasi perangkat daerah, dan (2) Data eksternal, berasal dari luar Instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, diperoleh hasil kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dengan rincian seperti pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,15 %	0,13%	86,6%
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indek Pertanaman (IP) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	2,082	1,86	89,4%
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,98	94,54	98,94%
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,96	24,94	99,91%

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran).

Dalam analisis ini juga akan diuraikan hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan serta langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali

Sesuai misi pertama yang tertuang pada Renstra Kementerian Pertanian Visi Kementerian Pertanian RI Tahun 2020-2024 yakni **terwujudnya ketahanan pangan** dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, serta sesuai dengan misi yang tertuang pada Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 yakni, **memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas memadai bagi kehidupan krama Bali** memiliki korelasi dengan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung yang dituangkan dalam perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 pada sasaran 1 yakni **meningkatnya produksi pangan strategis Kabupaten Badung**. Secara garis besar peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2.1

Capaian peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri

KOMODITI	CAPAIAN TH 2022			CAPAIAN TH 2023			% PENINGKATAN		
	NASIONAL	BALI	BADUNG	NASIONAL	BALI	BADUNG	NASIONAL	BALI	BADUNG
BERAS	31.356.017	349.038	59.515	32.074.045	390.155	62.821	2,29	11,78	5,55
KOPI	786.200	15.600	702,86	794.800	15.600	617,11	1,09	-	- 12,20
TELOR (Ayam Petelur)	5.155.997,6	191.589,1	2.095	5.566.339,4	176.855,4	15.333	7,96	-	631,89
DAGING AYAM (Pedaging)	3.185.698,5	75.772,7	12.633	3.765.573,1	86.016,5	24.807	18,20	13,52	96,37
DAGING SAPI	487.802,2	4.651	1.363	498.923,1	4.694	35.684	2,28	0,93	2.518,30
TOTAL	40.971.715	636.651	76.309	42.699.681	673.321	139.262	4,22	5,76	82,50

Sumber : <https://webapi.bps.go.id/>

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa , Kabupaten Badung berkontribusi terhadap prosentase peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri sebesar 0,32% atau sebanyak 139.262 Ton dari capaian Nasional yakni 42.699.681 Ton. Peningkatan produksi pangan strategis dalam negeri di Tahun 2023 diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan melaksanakan berbagai strategi seperti penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, menyusun neraca pangan strategis dan serta pemeliharaan jaringan irigasi.

3.2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi pangan strategis untuk

mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama : Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Produksi Pangan strategis	a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,15 %	0,13%	86,6%

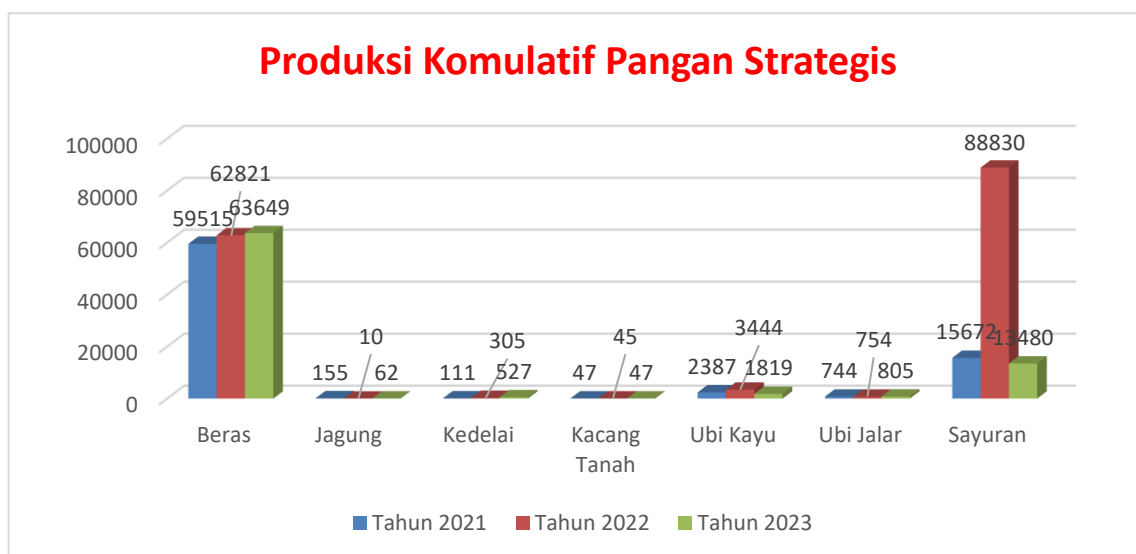
Target presentase (%) peningkatan produksi pangan strategis Tahun 2023 adalah 0,15% dan terealisasi sebesar 0,13 % dengan presentase 86,6%. Produksi kumulatif pangan strategis Tahun 2023 adalah sebesar 132.745 Ton. Sedangkan untuk perbandingan presentase peningkatan produksi pangan kumulatif tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2.1
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

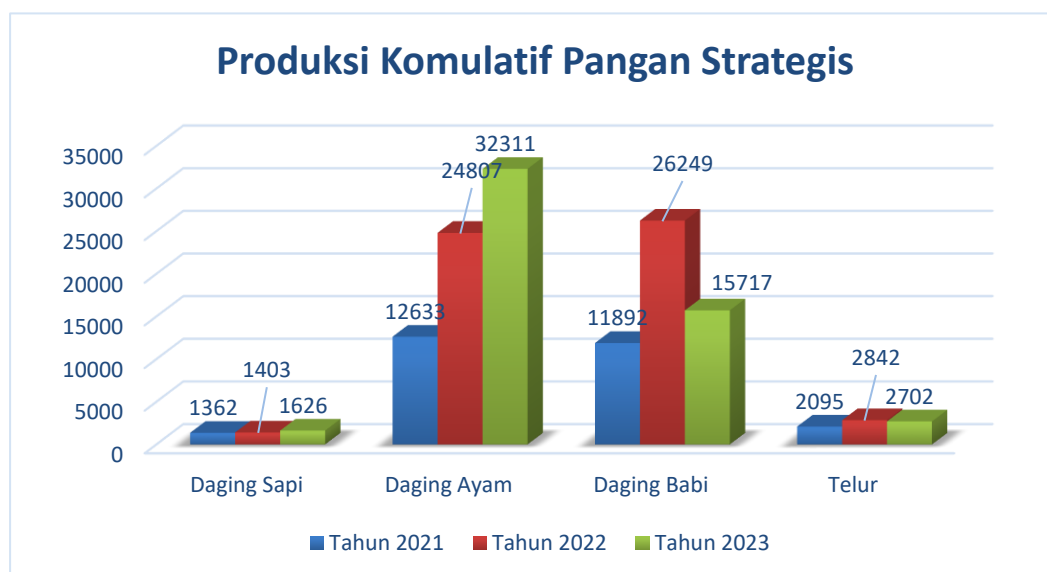
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Meningkatnya Produksi Pangan strategis	a. Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,16 %	0,13%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan produksi pangan strategis di Tahun 2023 mencapai 132.745 Ton. , dimana pada Tahun 2022 produksi pangan kumulatif mencapai 211.510 Ton.

Rekapitulasi produksi komulatif pangan (tanaman pangan) strategis dapat dilihat pada diagram berikut :



Rekapitulasi produksi komulatif pangan strategis (daging dan telur) dapat dilihat pada diagram berikut :



Terjadi penurunan terhadap produksi pangan strategis khususnya produksi daging dan telur. Terlihat pada diagram diatas bahwa pada Tahun 2022 total produksi daging adalah sebanyak 52.459 Ton dan produksi telur di Kabupaten Badung mencapai 2.842 Ton sedangkan terjadi penurunan jumlah produksi daging di Tahun 2023 menjadi 49.654 Ton dan produksi telur menurun menjadi 2.702 Ton.

Penurunan Produksi Pangan Strategis di Kabupaten Badung disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terjadinya El nino yang mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan sehingga mengganggu musim tanam dan sangat berpengaruh terhadap produksi pangan 2023.
2. Terjadinya bencana alam jebolnya terowongan irigasi yang berdampak terhadap 260 hektar lahan sawah mengalami gagal panen.
3. Maraknya alih fungsi lahan persawahan menjadi non persawahan seperti perumahan, vila, hotel dan restoran.
4. Perbaikan jaringan irigasi yang mengakibatkan tertundanya masa tanam
5. Menurunnya kualitas dan debit air
6. Menurunnya tingkat kesuburan tanah yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman
7. Terjadinya kasus penyakit Meningitis Streptococcus Suis yang bersifat menular kepada manusia (zoonosis) sehingga berdampak pada menurunnya konsumsi daging babi
8. Meningkatnya permintaan babi potong dari luar daerah dengan harga yang lebih mahal sehingga menurunnya jumlah pemotongan babi untuk konsumsi lokal
9. Menurunnya produksi telur disebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku pakan terutama jagung sehingga terjadi penurunan populasi ayam petelur

Meskipun terdapat permasalahan diatas, tetapi kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Badung masih tetap stabil, hal ini disebabkan karena strategi Dinas Pertanian dan Pangan dengan merancang berbagai macam program kegiatan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk terhadap perubahan iklim secara global yang terjadi , antara lain :

1. Menghimbau kepada petani untuk mempercepat masa tanam agar dapat memanfaatkan air secara efektif dan efisien.
2. Penerapan pola tanam dengan pergiliran komoditas serta pemilihan varietas benih tanaman yang tidak membutuhkan banyak air dan tahan hama.
3. Melakukan perbaikan dan perawatan jaringan irigasi untuk mencegah terjadinya kebocoran air

4. Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang LP2B dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
5. Meningkatkan kesuburan tanah melalui upaya pergiliran komoditas, pemanfaatan pupuk organik dan pengadaan pembenah tanah.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan melalui komunikasi informasi dan edukasi (KIE) , memperluas cakupan vaksinasi , meningkatkan pelayanan kepada kelompok ternak
7. Meningkatkan populasi ternak yang berkualitas melalui kegiatan pengadaan bibit ternak dan meningkatkan pelayanan inseminasi buatan
8. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan:
 - Demplot Cabai rawit seluas 15 Ha
 - Demplot Bawang merah seluas 2 Ha yang dilaksanakan di Subak Munggu Kecamatan Mengwi dan Subak Tungku Kecamatan Mengwi
 - Demplot Jagung seluas 5 Ha di Subak Penarungan Munduk Umadesa Kecamatan Mengwi
 - Demplot Asparagus seluas 10 Ha di Kelompok Green Asparagus dan Kelompok Tani Bumi Cakra Kembang Kecamatan Petang



Kegiatan demplot ini terus dikembangkan, sejalan dengan program pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Selain itu kegiatan demplot ini memiliki pengaruh besar bagi perkembangan teknologi pertanian di Kabupaten Badung.

Demplot merupakan suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan pengaruh sesuatu terhadap tanaman. Melalui kegiatan demplot, petani dapat langsung melihat dan mempraktikkan inovasi teknologi budidaya, varietas unggul baru, pemupukan dan lain-lain yang dianjurkan sehingga diharapkan menambah pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan petani dalam pelaksanaan budidaya yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas.

9. Pelaksanaan Gertam (Gerakan Tanam) Bawang Merah di Subak Munggu Desa Munggu Kecamatan Mengwi. Gerakan tanam ini merupakan program jangka pendek dan menengah dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam upaya pengendalian mitigasi dampak inflasi.



10. Adanya pelaksanaan kegiatan demplot tanaman perkebunan seperti:

- Demplot vanili seluas 5 Ha di Sulangai Kecamatan Petang
- Demplot Kakao di Desa Pangsan dan Desa Petang Kecamatan Petang

11. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Pembentukan Unit Reaksi Cepat

Mengingat dampak buruk organisme pengganggu tumbuhan tidak hanya berdampak bagi penurunan angka produksi pertanian, kerugian yang dialami petani tetapi juga secara lebih luas dapat mengakibatkan kerawanan pangan maka pada tahun 2023, Dinas Pertanian dan Pangan mengambil langkah cepat dengan membentuk Unit Reaksi Cepat Tim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kabupaten Badung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani , sehingga serangan hama penyakit tanaman dapat tertangani dengan cepat dan tuntas.

Tidak hanya itu, dalam mendukung fungsi dan tugas Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) melalui Unit Reaksi Cepat juga didukung dengan sarana seperti Mobil URC , Drone Pertanian dan Obat-obatan.

Mobil URC dan drone pertanian ini merupakan pengadaan Tahun 2023 yang bertujuan tidak hanya mempercepat proses pengendalian hama dan penyakit tumbuhan tetapi sekaligus memberikan pengenalan kepada petani terhadap penerapan teknologi pertanian multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pertanian seperti penyemaian, penyebaran pupuk sehingga dapat menghasilkan produk pertanian secara lebih efektif dan efisien.



12. Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian

Tahun 2023 pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan berkomitmen melakukan perbaikan terhadap beberapa infastruktur dan sarana pengembangan pertanian berupa bantuan maupun subsidi. Bantuan prasarana pertanian yang diberikan Tahun 2023 yakni sebanyak 7 (tujuh) unit yang bersumber dari APBN dan APBD. Bantuan tersebut berupa Jalan Usaha Tani



yang bersumber dari APBN sebanyak 2 unit, Jaringan Irigasi Tersier sebanyak 2 unit yang bersumber dari APBN dan 3 unit jalan usaha tani yang dananya bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

- Jalan Usaha Tani di Subak Karang Dalem
- Jalan Usaha Tani di Subak Ayung
- Jalan Usaha Tani di Subak Latu
- Jalan Usaha Tani di Subak Uma Bun
- Jalan Usaha Tani di Subak Taman
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Subak Selasih dan Subak Tanah Yeng



Pemberian bantuan sarana pertanian yang dilaksanakan selama Tahun 2023 berupa penyerahan benih/bibit , subsidi benih dan asuransi serta penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian. Total sarana berupa alat dan mesin pertanian yang keseluruhan dananya digelontorkan dari APBD Kabupaten Badung adalah sebanyak 28 Unit.



Adapun bantuan bibit pohon sampai dengan tahun 2023 yang telah disalurkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :Tanaman hortikultura sebanyak 1.290.000 pohon

- Alpukat sebanyak 1.189 pohon
- Kelapa genjah 5000 pohon
- Manggis 150.000 pohon
- Mangga 100.000 pohon
- Durian 6.600 pohon
- Tanaman bunga sebanyak 625.100 pohon



13. Masyarakat Tanam Cabe

selain mengembangkan tanaman cabai rawit di kawasan/ areal sawah , guna mengantisipasi dampak inflasi khususnya gejala harga cabai dan dampak perubahan iklim global serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, Dinas Pertanian dan pangan turut melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberikan bibit cabai kepada masyarakat dan sarana pengembangannya serta sosialisasi teknik budidaya cabai di lahan pekarangan.



Awal peluncuran program Matanabe merupakan program CSR kerjasama Dinas Pertanian dan Pangan Badung dengan Bank BPD Bali, dalam rangka menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah pandemi Covid-19, tetapi di Tahun 2023 dana kegiatan ini murni bersumber dari APBD Kabupaten Badung. Tahun 2023 kegiatan Matanabe dilaksanakan di Br. Aseman Kangin desa tibubeneng kuta utara dan Br.Tambyak desa pecatu kuta selatan

14. Siswa Belajar Bertani (SIBERTANI)

Salah satu strategi menarik minat para petani muda ialah mengenalkan teknik budidaya pertanian pada siswa-siswi sekolah. Dengan menumbuhkan minat budidaya pertanian pada siswa-siswi , diharapkan akan semakin bertambahnya jumlah petani muda di Kabupaten Badung yang tentunya berdampak pada penambahan tenaga kerja dan produksi pertanian.

Tahun 2023 , sibertani ini didanai dari APBD Kabupaten Badung dan dilaksanakan di 6 (enam) sekolah yaitu :

- SMP 2 Kuta Selatan
- SMP 4 Kuta Selatan
- SMP 5 Kuta Selatan
- SMP Ngurah Rai Kuta Selatan
- SMP 1 Kuta Utara
- SMP 4 Kuta Utara



15. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani melalui Pelatihan

Pada tahun 2023, Dinas Pertanian dan Pangan memberikan pelatihan kepada pekaheh subak terkait intensifikasi tanaman perkebunan dan optimalisasi produksi tanaman pangan

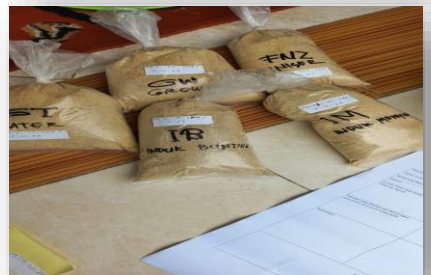


16 Pelaksanaan Kegiatan Survei Ubinan dan Rapat Subron

Kegiatan Ubinan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang produksi pada tanaman pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi luas lahan dan indeks pertanaman terkini dengan cara menimbang hasil (kg/ubinan) dan dilakukan wawancara dengan penggarap atau pemilik lahan untuk mengumpulkan data valid yang berkaitan dengan produktivitas. Setelah mendapatkan data ubinan kemudian data tersebut akan dibahas dalam rapat rutin subron, guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Badung. Kegiatan ini sangat penting dilakukan guna mengambil kebijakan terkait pengembangan tanaman pangan selanjutnya, sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman.

Strategi di Bidang peternakan dan kesehatan hewan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi daging dan telur yakni :

1. Adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan terkait inseminasi buatan khusus ternak sapi dan babi
2. Pengawasan peredaran pakan ternak (pengiriman sampel pakan ternak)
3. Kegiatan vaksinasi PMK bagi hewan ternak
Kegiatan vaksinasi kepada hewan ternak ini menyasar hewan ternak tidak hanya sapi melainkan ternak babi. Vaksinasi pada ternak sapi dan babi penting untuk dilakukan karena merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan yang rentan PMK.
4. Vaksinasi SE untuk sapi
5. Melakukan spraying dikandang/tempat pemeliharaan babi, ayam, dan sapi
6. Kegiatan ante dan post mortem hewan/ternak dalam rangka keamanan Bahan Asal Hewan untuk dapat menjaga mutu dan kualitas daging /ASUH (aman, sehat utuh dan halal)
7. Kegiatan penerapan hygiene sanitasi usaha produk hewan dalam rangka penerbitan rekomendasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)



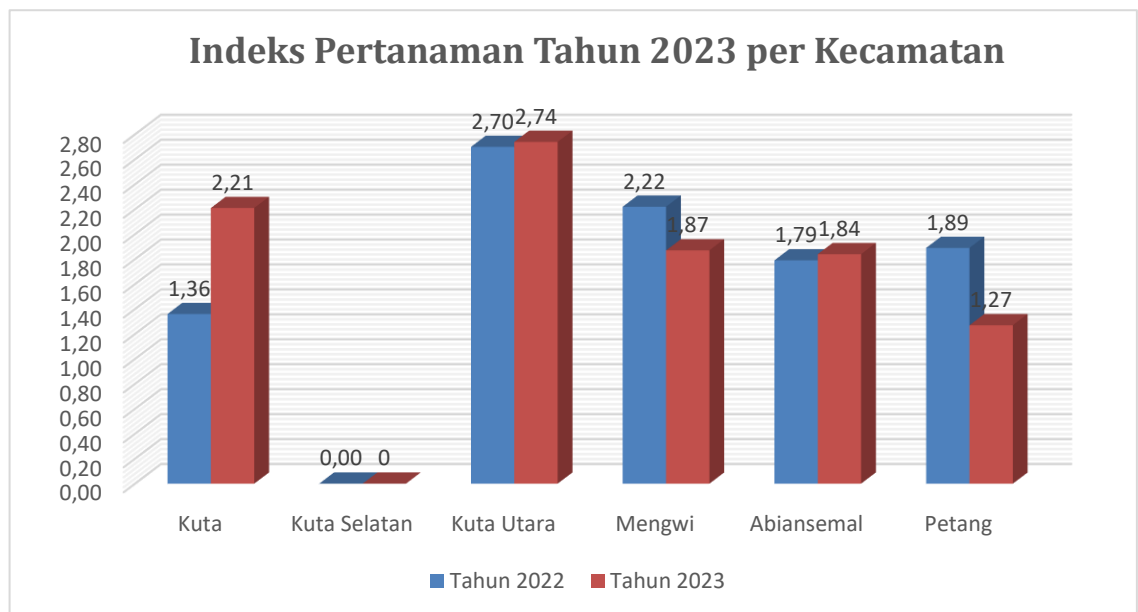
Sasaran 2 : Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indek Pertanaman (IP)	2,09	1,86	88%

Optimalisasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dapat diukur melalui indeks pertanaman. **Indeks Pertanaman (IP)** merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang ada untuk ditanami.

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Indikator Kinerja Indeks Pertanaman Tahun 2023 adalah sebesar 1,86 dari target 2,09 atau terealisasi sebesar 88 %.

Indeks Pertanaman Kabupaten Badung per Kecamatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Diagram dibawah ini :



Dari diagram diatas bahwa, dari 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara memiliki indeks pertanaman tertinggi di Tahun 2023 dan Kecamatan Kuta Selatan merupakan kecamatan yang tidak memiliki indeks pertanaman, karena tidak terdapat lahan pertanian di wilayah tersebut. Terjadi penurunan angka indeks pertanaman di Kecamatan Mengwi dan Petang yang cukup signifikan. Ini salah satunya disebabkan karena terjadinya bencana alam yang mengakibatkan rusaknya prasarana pertanian di subak Penarungan Kecamatan Mengwi yang berujung pada terjadinya gagal panen dan tunda tanam , sedangkan di Kecamatan Petang selain terjadi perbaikan saluran irigasi yang mengakibatkan tunda tanam juga dikarenakan debit air yang kecil akibat dampak perubahan iklim.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 setiap Tahun

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Indek Pertanaman (IP)	2,22	1,86

Turunnya indeks pertanaman Tahun 2023 dan tidak tercapainya target indikator sasaran kedua selaras dengan menurunnya produksi pertanian yaitu :

1. Terjadinya El nino yang mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan sehingga mengganggu musim tanam dan sangat berpengaruh terhadap produksi pangan 2023.
2. Terjadinya bencana alam jebolnya terowongan irigasi yang berdampak terhadap 260 hektar lahan sawah mengalami gagal panen.
3. Maraknya alih fungsi lahan persawahan menjadi non persawahan seperti perumahan, vila, hotel dan restoran.
4. Perbaikan jaringan irigasi yang mengakibatkan tertundanya masa tanam
5. Menurunnya kualitas dan debit air.
6. Menurunnya tingkat kesuburan tanah yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman.
7. Banyaknya lahan sawah dengan status bera atau tidak dimanfaatkan karena tingginya biaya produksi untuk beralih komoditas

Untuk mencapai IP yang maksimal perlu memperhatikan beberapa aspek antara lain sosial budaya, ketersediaan air, ketersediaan alsintan, jenis komoditas, dan ketersediaan modal-sarana produksi, tersedia tenaga kerja pada saat tanam dan panen, serta sarana pertanian untuk mengolah tanah, sehingga setiap kegiatan pengolahan lahan dapat diselesaikan lebih cepat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan indeks pertanaman di Tahun 2023, antara lain:

1. Memberikan sosialisasi kepada petani Subak terkait optimalisasi penggunaan lahan pertanian dengan pola tanam sesuai komoditas. Pola tanam merupakan usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu. Sehingga kegiatan ini dapat secara efektif meningkatkan kesuburan tanah (optimalisasi lahan)
2. Melakukan pendampingan oleh penyuluh pertanian dalam hal pengaturan masa tanam agar lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian

Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian sangat berpengaruh terhadap indeks pertanaman melalui kegiatan pemberian bantuan subsidi benih, bantuan alat dan mesin pertanian, perlindungan asuransi, bantuan pupuk dan pestisida, pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan jaringan irigasi.



Sasaran 3 : Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan. Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,97	94,54	98,94%

Skor Pola Pangan Harapan merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.

Berdasarkan data survei skor PPH secara mandiri dan bekerjasama dengan akademisi, maka didapatkan perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Badung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 Skor PPH Kabupaten Badung Sebesar 91,2 dan Pada Tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 94,54, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Analisa Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Makanan Penduduk
Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Kelompok Bahan Makanan	Deskripsi Konsumsi			Pola Pangan Harapan	
		% AKE	Bobot Kelompok Pangan	Skor AKE	Skor Standar	Skor nyata
1	Padi-padian	59,31	0,5	29,66	25	25
2	Umbi-umbian	2,2	0,5	1,1	2,5	1,1
3	Pangan Hewani	14,68	2	29,36	24	24
4	Minyak dan Lemak	9,84	0,5	4,92	5	4,92
5	Buah dan Biji Berminyak	2,52	0,5	1,26	1	1
6	Kacang-kacangan	3,79	2	7,58	10	7,58
7	Gula	4	0,5	2	2,5	2
8	Sayuran dan buah-buahan	5,79	0,5	28,94	30	28,94
	Jumlah	102,12				94,54

Sumber: Bidang Pangan dan Penyuluhan (2023)

Kenaikan Skor PPH yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan karena adanya peningkatan pola konsumsi pangan yaitu pada konsumsi umbian-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah dan juga disebabkan karena menurunkan konsumsi kelompok padi-padian.

Sedangkan perbandingan skor pola pangan harapan dari Tahun 2022 dan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3 setiap Tahun

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,2	94,54

Meningkatnya skor pola pangan harapan di Tahun 2023 menunjukkan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Badung sudah menuju komposisi yang beragam, bergizi dan seimbang. Capaian ini merupakan akumulasi upaya Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan program kegiatan yang efektif untuk mendukung peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Badung seperti :

1. Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal

Setiap tahun Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung melaksanakan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi Kelompok Wanita Tani yang bertujuan untuk mendorong penganekaragaman konsumsi pangan lokal rumah tangga. Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning dikembangkan menjadi tepung. Kedepan diharapkan aneka tepung ini dapat diolah sebagai pangan pokok pengganti beras.

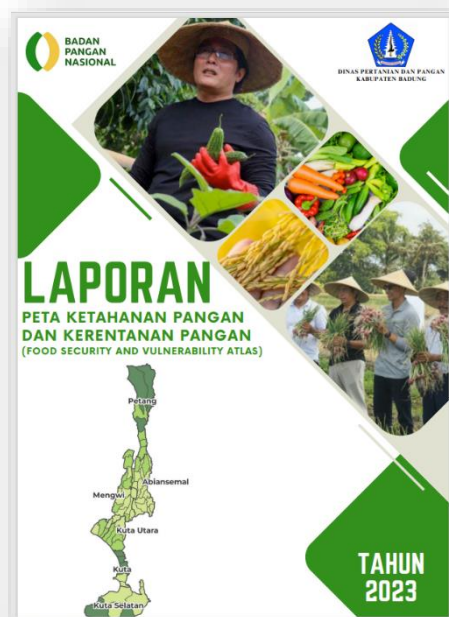


2. Gerakan Pangan Murah

Guna menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan menjelang Hari Besar Keagamaan maka pada Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah bersumber dari APBN dan APBD. Pelaksanaan GPM Kabupaten Badung menggandeng Perum BULOG dan Gapoktan, serta pelaku usaha setempat lainnya menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok untuk dijual dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar. Sejumlah komoditas tersebut meliputi, beras, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan (tambah foto masyarakat belanja)



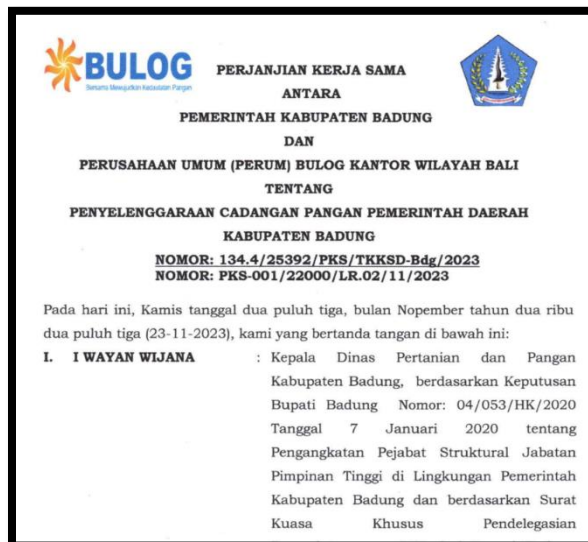
3. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan



Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengukur dan memitigasi kerawanan pangan di Kabupaten Badung. Ketersediaan FSVA dan juga Skor PPH merupakan bagian dari upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam melakukan inovasi dan transformasi penyediaan data dan informasi. Hasil FSVA dan capaian Skor PPH kepada seluruh pihak serta stakeholders pangan terkait, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan dalam upaya membangun sistem pangan nasional yang adaptif, tangguh dan berkelanjutan.

4. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah

Keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana ataupun terjadi gejolak harga pasar yang cukup tinggi di Kabupaten badung. Dengan memiliki CPPD, pada kondisi bencana dan darurat Pemerintah daerah dapat secara cepat melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak. Langkah ini lebih mudah dibandingkan menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat, karena harus ada penetapan status keadaan darurat atau kerawanan pangan pasca bencana terlebih dahulu. Tahun 2022 Kabupaten Badung belum memiliki cadangan pangan sedangkan Tahun 2023 Kabupaten telah dilaksanakan kerjasama dengan Perusahaan Umum Bulog terkait penyediaan cadangan pangan beras sebanyak 140 Ton.



Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian. Untuk mengukur sasaran ini digunakan 1 indikator kinerja utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB	24,96	24,94	99,91 %

Mulai Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Badung tidak lagi melaksanakan evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bagi perangkat daerah, sehingga capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023 tidak bisa direalisasikan dan masih menggunakan indeks RB Tahun 2022 yaitu 24,94 dari target capaian nilai 24,96 (Tercapai 99,91%) dengan hasil sebagai berikut :

- a. Aspek pemenuhan memperoleh nilai 9,66% dari bobot yang ditetapkan 14,60%
- b. Aspek reform memperoleh nilai 15,28% dari bobot yang ditetapkan sebesar 21,70%

Salah satu wujud keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mengingat Tahun 2023 tidak dilakukan evaluasi indeks RB maka nilai LKJIP dapat dijadikan salah satu indikator pelaksanaan RB. Berdasarkan hasil evaluasi LKJIP oleh Inspektorat, nilai LKJIP Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 adalah sebesar

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan pelaporan kinerja tahun berikutnya kami akan mengusulkan dilakukannya revisi terhadap indikator sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026.

Untuk dapat memenuhi target yang diharapkan perlu disusun program yang efektif untuk mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi , salah satunya dengan mendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan berbasis elektronik secara lebih efektif di Tahun berikutnya, upaya tersebut sudah dilakukan, dengan merancang sistem “aplikasi Bang Goni” bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Badung dan merancang sistem aplikasi “Sampi Digital” bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.



Badung Go Tani



3.3 Aspek Keuangan

Untuk Merealisasikan dan mencapai target-target sasaran melalui pencapaian target indikator kinerja utama menggunakan dana dengan gambaran sebagai berikut :

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		7.668.608.513	6.402.214.419	83,49
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	7.633.473.054	6.378.205.469	83,56
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	4.604.412.344	3.783.239.859	82,17
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1.207.227.650	803.304.020	66,54
2	09	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3.397.184.694	2.979.935.839	87,72
2	09	03	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik	1.708.000.000	1.609.720.000	94,25
2	09	03	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.708.000.000	1.609.720.000	94,25
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	1.321.060.710	985.245.610	74,58
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.321.060.710	985.245.610	74,58
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	11.371.075	2.861.400	25,16

2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	5.815.590	2.861.400	49,20
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	5.815.590	2.861.400	49,20
2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	5.555.485	0	0,00
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.555.485	0	0,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	23.764.384	21.147.550	88,99
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	23.764.384	21.147.550	88,99
2	09	05	2,01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.606.720	13.494.550	86,47
2	09	05	2,01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	23.253.000	7.653.000	32,91
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		80.405.201.644	67.538.313.007	84,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKjIP	46.612.089.262	38.678.747.219	82,98
3	27	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu	13.544.200	11.925.110	88,05
3	27	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.292.383	5.961.610	94,74
3	27	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.251.817	5.963.500	82,23
3	27	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu</i>	39.126.078.857	31.852.827.768	81,41

3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39.126.078.857	31.852.827.768	81,41
3	27	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu</i>	8.074.254	7.758.418	96,09
3	27	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.856.918	5.699.000	97,30
3	27	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.217.336	2.059.418	92,88
3	27	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu</i>	966.835.101	824.593.500	85,29
3	27	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24.500.000	24.455.000	99,82
3	27	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	95.435.794	24.630.000	25,81
3	27	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pertanian dan Pangan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34.171.273	24.012.000	70,27
3	27	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	724.265.947	663.988.000	91,68
3	27	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21.442.087	20.488.500	95,55
3	27	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	67.020.000	67.020.000	100,00
3	27	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.589.636.386	3.423.862.692	95,38
3	27	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	291.930.000	291.500.000	99,85

3	27	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.510.753.379	2.396.062.000	95,43
3	27	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	786.953.007	736.300.692	93,56
3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	1.489.189.791	1.321.147.714	88,72
3	27	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	100,00
3	27	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	604.913.679	474.224.458	78,40
3	27	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	872.276.112	834.923.256	95,72
3	27	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	1.418.730.673	1.236.632.017	87,16
3	27	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.175.353.941	1.004.560.220	85,47
3	27	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118.996.732	109.251.435	91,81
3	27	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	124.380.000	122.820.362	98,75
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	18.309.211.929	15.892.573.785	86,80
3	27	02	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	13.369.337.493	11.484.491.475	85,90
3	27	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	9.421.019.605	8.458.756.368	89,79

3	27	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.948.317.888	3.025.735.107	76,63
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	460.359.942	456.574.824	99,18
3	27	02	2,02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	407.007.189	406.422.024	99,86
3	27	02	2,02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	53.352.753	50.152.800	94,00
3	27	02	2,03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	32.158.591	29.837.000	92,78
3	27	02	2,03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	32.158.591	29.837.000	92,78
3	27	02	2,04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	1.355.529	1.072.000	79,08
3	27	02	2,04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1.355.529	1.072.000	79,08
3	27	02	2,05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	15.809.337	14.884.900	94,15
3	27	02	2,05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	15.809.337	14.884.900	94,15
3	27	02	2,06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	4.430.191.037	3.905.713.586	88,16
3	27	02	2,06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.430.191.037	3.905.713.586	88,16
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	6.919.240.210	6.018.425.836	86,98

3	27	03	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	86.581.446	56.802.346	65,61
3	27	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	86.581.446	56.802.346	65,61
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	3.482.144.699	2.761.659.028	79,31
3	27	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.482.144.699	2.761.659.028	79,31
3	27	03	2,03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik	3.350.514.065	3.199.964.462	95,51
3	27	03	2,03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	3.350.514.065	3.199.964.462	95,51
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	4.691.787.269	3.332.473.562	71,03
3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	4.113.895.962	2.894.586.722	70,36
3	27	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4.113.895.962	2.894.586.722	70,36
3	27	04	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa	346.506.554	238.640.246	68,87
3	27	04	2,03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	346.506.554	238.640.246	68,87
3	27	04	2,04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi	231.384.753	199.246.594	86,11
3	27	04	2,04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	44.070.588	30.898.000	70,11

3	27	04		03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	122.615.833	113.398.234	92,48
3	27	04	2,04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	64.698.332	54.950.360	84,93
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	1.326.633.037	1.167.987.142	88,04
3	27	05	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	1.326.633.037	1.167.987.142	88,04
3	27	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	141.966.653	141.502.080	99,67
3	27	05	2,01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.184.666.384	1.026.485.062	86,65
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	2.546.239.937	2.448.105.463	96,15
3	27	07	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	2.546.239.937	2.448.105.463	96,15
3	27	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.271.805.017	1.219.853.391	95,92
3	27	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	249.166.684	207.516.428	83,28
3	27	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.025.268.236	1.020.735.644	99,56

Dari gambaran aspek keuangan diatas , terdapat sub kegiatan dengan nilai realisasi keuangan yang masih rendah (dibawah 75%) :

1. Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
4. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Pertanian dan Pangan)
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
9. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
10. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Dari sepuluh sub kegiatan yang serapannya dibawah 75% tersebut disebabkan karena alasan sebagai berikut :

1. Sebagian besar dikarenakan efisiensi pada proses pengadaan barang/jasa
2. Pada Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan terdapat belanja yang memang sudah didanai dari APBN sehingga dana pada APBD tidak dapat terserap
3. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tidak terealisasi karena di Tahun 2023 tidak terdapat daerah di Kabupaten Badung yang ditetapkan sebagai daerah rawan pangan
4. Pada Sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis , terdapat pengadaan barang dalam negeri yang harganya jauh dari standar harga dalam dokumen anggaran.

3.4 Prestasi Yang Diraih

Prestasi yang diraih selama tahun 2022-2023 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung antara lain :

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai Badan Publik Informatif
2. BPP Berprestasi Peringkat II (Kedua Tingkat Provinsi Bali Tahun 2022
3. Kabupaten dengan Indeks Ketahanan Pangan Terbaik II Tahun 2022
4. Top 15 Inovasi Pelayanan Publik “Asparagus ditanam ekonomi mapan” Tahun 2023
5. Anugerah Mangupura Award peringkat VI Tahun 2023
6. Peringkat VII Pelayanan Publik Terbaik di Kabupaten Badung
7. BPP Petang Peringkat I Tingkat Provinsi Bali Tahun 2023





4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun sebagai jabaran visi dan misi kepala daerah serta strategi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 4 (Empat) indikator.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab tersebut diatas , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengingat berbagai tantangan yang disebabkan oleh faktor alam , seperti dampak el nino, serangan hama penyakit dan bencana alam, dari 4 (Empat) indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Presentase Peningkatan Produksi Pangan Strategis tercapai 86.6%
 - b. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan tercapai 89,4%
 - c. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan tercapai 98,94%
 - d. Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian tercapai 99,91 %
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka skala nilai peringkat kinerja berdasarkan capaian 4 (empat) indikator sasaran tergolong dalam kategori tinggi.
3. Tidak tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor eksternal :
 - Perubahan dan variabilitas iklim yang terjadi secara global yaitu terjadinya el nino. El nino merupakan perubahan iklim global yang berdampak di seluruh Indonesia tidak hanya di Kabupaten Badung yang mengakibatkan curah hujan menurun / musim kemarau yang berkepanjangan dan ini sangat berpengaruh terhadap produksi pangan 2023 dan 2024.
 - Terjadinya alih fungsi lahan
 - Perbaikan prasarana pertanian yang mengakibatkan tertundanya masa tanam
 - Menurunnya ketersediaan air
4. Tidak tercapainya indikator sasaran indeks reformasi birokrasi disebabkan karena pada tahun 2023 inspektorat Kabupaten Badung tidak melaksanakan evaluasi mandiri sehingga dalam pelaporan ini masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2022 dan Nilai LKJIP sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi



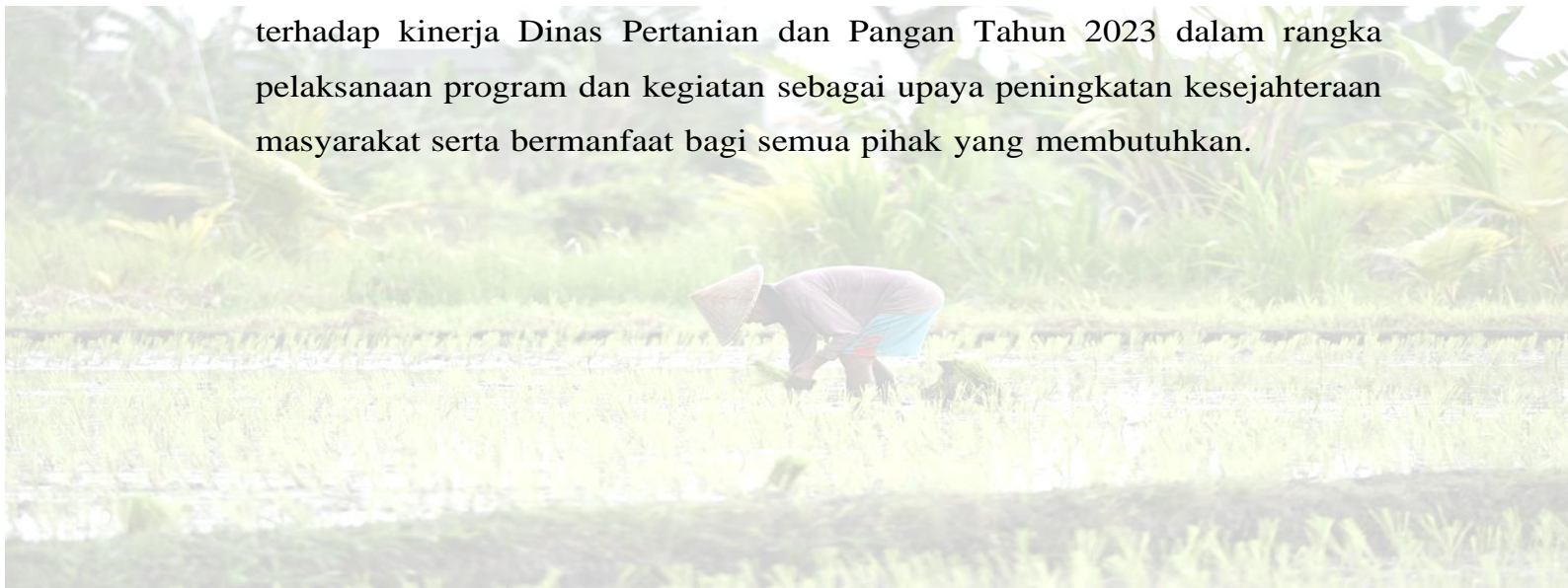
4.2 Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga bisa dilakukan antisipasi apabila terjadi perubahan cuaca yang ekstrem maupun perbaikan saluran irigasi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
2. Melakukan penyempurnaan terhadap pohon kinerja sehingga dapat dirumuskan sasaran kinerja yang seharusnya dicapai dan didukung dengan program/kegiatan yang benar-benar dapat mencapai output dan outcome yang mendukung pencapaian target kinerja.
3. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan dana CSR.
4. Merintis kerjasama dengan berbagai organisasi untuk memperluas akses pemasaran.
5. Merancang berbagai program terobosan / inovasi khususnya dengan memanfaatkan sistem informasi/elektronik
6. Mengusulkan dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian semoga dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



4.3 Program Inovasi

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Salah satu upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan mengembangkan program-program inovasi sesuai dengan kewenangan yaitu :

1. Inovasi MATANABE (Masyarakat Tanam Cabe) , Antisipasi kenaikan harga cabai
2. Inovasi sistem aplikasi Bang GoNi (Badung Go Tani)
3. Inovasi BANG ROMI (Badung Promo Tani)
4. Inovasi Mangupura Vet Klinik
5. Inovasi SIBERTANI (Siswa Belajar Bertani)
6. SIDUTA (Siswa Edu Wisata)
7. Inovasi TAK GIGIT HABIS (Tata Laksana Gigitan Hewan Rabies)
8. Inovasi Si-Traktor (Sistem Informasi Dan Tatalaksana Rekomendasi Solar Untuk Traktor)
9. Inovasi SAMPI Digital

Mangupura, 26 Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,



Dr. I Wayan Wijana S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198812 1 001